



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021  
**Masa Persidangan** : V  
**Rapat ke** : 10  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Agama Republik Indonesia  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Rabu, 2 Juni 2021  
**Waktu** : 14.35 WIB s.d. 16.06 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, PT 10270
- Acara** : 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP K-L Tahun 2022);  
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2020.  
3. Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F- PAN)  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 42 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**  
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)  
2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)  
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)  
4. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

5. I Komang Koheri, SE.
6. Paryono, S.H., M.H.
7. Ina Ammania
8. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
9. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
10. H. Rachmat Hidayat, S.H.
11. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
12. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

13. H. Jhon Kenedy Azis, S.H.
14. Mohammad Saleh, S.E.
15. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
16. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
17. Dra. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
18. Muhammad Ali Ridha.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

19. M. Husni, S.E., M.M.
20. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
21. Abdul Wachid
22. Drs. H. Zainul Arifin
23. H. Iwan Kurniawan, S.H., M.Si.
24. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

25. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr.
26. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.\
27. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

28. Dra. Anisah Syakur, M.Ag.
29. MF. Nurhuda Y.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

30. Drs. H. Achmad, M.Si.
31. Wastam, S.E., S.H.
32. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
33. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

34. K.H. Bukhori, Lc., M.A.
35. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
36. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
37. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., M.A.
38. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

39. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
40. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

41. KH. Muslich Zainal Abidin
42. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I.

**Anggota Izin**

- :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
  2. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
  3. Umar Bashor
  4. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
  5. Dra. Hj. Delmeria.
  6. Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.
  7. H. Maman Imanul Haq

**Undangan**

- :
- Menteri Agama beserta jajaran.

## **JALANNYA RAPAT :**

### **KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):**

*Bismilahirrahmannirahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Selamat siang.

Salam Sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.  
Yang terhormat para Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik di ruang Komisi VIII maupun secara virtual.  
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan Ridhonya kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Republik Indonesia.

Sebagaimana biasa kita mulai rangkaian rapat kerja ini dengan berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kepada yang beragama Islam Mari kita baca Ummul Kitab Al Fatihah.

### **BERDOA : MULAI**

### **BERDOA : SELESAI**

Pak Menteri yang kami hormati.

Para Pimpinan para Anggota Komisi VIII.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat-rapat di DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi DPR tanggal 8 April 2001 dan sesuai dengan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 6 Mei 2001, maka pada hari ini Rabu 2 Juni 2001 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertama, kebijakan final penyelenggaraan Ibadah Haji tapi ini nanti akan kita bicarakan secara khusus setelah paparan pengantar anggaran Tahun 2022 oleh Pak Menteri. Oleh karena itu para Anggota fokus kita kepada ada dua agenda yang pertama itu Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 dan RKP Tahun 2022.
2. Yang selanjutnya juga ada evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan anggaran tahun 2021 yang sedang berjalan.

Pak Menteri yang saya hormati para Anggota para Pimpinan.

Sesuai dengan laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI bahwa sekarang sudah dihadiri secara fisik sebanyak 20 Anggota secara virtual

sebanyak 24 Anggota izin ada 6 orang dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) korum telah tercapai atas persetujuan Pak Menteri serta para Anggota dan para Pimpinan izin kami membuka rapat kerja dengan mengucapkan *Bismillahirrahim* rapat terbuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.35 WIB.)**

Baik agenda kita pada hari ini.

1. Yang pertama pengantar dari Pimpinan rapat.
2. Yang kedua penjelasan dari Menteri Agama terhadap agenda yang sudah saya sampaikan tadi yang.
3. Yang ketiga tentu respon.

Tapi saya mohon dari meja Pimpinan karena ini pengantar dari Pak Menteri nanti akan diperdalam di RDP dengan Eselon I dan agendanya sudah ada Pak Menteri tanggal untuk Kementerian Agama pedalaman atau konsinyering bersama Komisi VIII dan Eselon I itu hari Selasa tanggal 8 Juni Pak Sekjen. Oleh karena itu harapan kami sebelum tanggal itu tadi kesepakatan seperti rapat tadi pagi dengan BNPB kalau memungkinkan dan ini permintaan dari Anggota bahannya sudah dikirimkan terlebih dahulu Pak sehingga pendalaman itu benar-benar tidak ada yang tercecer nanti ketika kita mengambil keputusan dalam tingkat Raker itu sudah semua kita selesaikan ditingkatkan konsinyering maka mohon persiapan dari Kementerian Agama tanggal 8 Insyaallah kita akan pendalaman.

Oleh karena itu para Anggota setelah Pak Menteri menyampaikan paparan pengantar RPBN termasuk evaluasi nanti ya kita kan perdalam konsinyering tanggal 8 Juni 2021 di Kopo kemudian yang ke itu sekaligus pengumuman ada 3 hari 7, 8, 9 ya mohon semua fraksi ataukah kapoksi untuk mengkonsolidasikan anggotanya.

4. Kemudian yang keempat tentu dari rapat kerja ini akan kita bacakan kesimpulan nanti.
5. Dan yang kelima penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita sepakati bisa ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik kita mulai acara Raker tadi jam 14.40 kita akhiri jam 16 ya atau 15.30 16 setuju ya nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita perpanjang kita perpanjang waktunya.

Pak Menteri yang kami hormati para Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII.

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan rapat kerja pada hari ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah menjadi sebanyak 3 kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa tugas Komisi DPR di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Oleh karena itu pada rapat hari ini akan dibahas pertama kebijakan final yang tadi saya katakan ini juga menyangkut dengan anggaran tapi kalau masalah haji nanti kami beritahukan kepada seluruh Anggota dan kepada para Pimpinan setelah Pak Menteri menyampaikan anggaran RAPBN kita akan makan rapat tertutup rapat tertutup khusus membahas haji.

Jadi mohon para Anggota setelah kita selesaikan anggaran nanti jangan dulu meninggalkan tempat kita akan rapat tertutup untuk mengambil kebijakan final tentang persoalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Yang selanjutnya kita ingin mendengar dari Pak Menteri Agama untuk menyampaikan beberapa hal pokok tentang anggaran termasuk evaluasi anggaran yang sedang berjalan dan anggaran tahun 2020 tentu banyak beberapa isu yang penting kita sampaikan bahwa dari hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2020-2021 evaluasi ini dapat diharapkan memiliki dua aspek yang berjalan baik dan tidak baik pelaksanaan program dan anggaran yang baik misalnya ini menjadi kebanggaan kita semua. Pak Menteri, pencapaian MAN Insan Cendekia Serpong yang menempati ranking nomor 2 nasional dari seluruh sekolah menengah dan madrasah aliyah yang ada. Ini artinya luar biasa madrasah juga kita bisa bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain.

Pelaksanaan program dan anggaran yang tidak berjalan baik misalnya pelaksanaan program bantuan operasional Pak BOP kemarin mungkin secara umum baik Pak Menteri tapi masih banyak misalkan ada pungutan atau hal-hal yang mungkin berjalan tidak baik tapi itu tetap menjadi evaluasi kita untuk di masa-masa yang akan datang.

Kemudian juga terdapat pembangunan gedung yang mangkrak kami beberapa kali Pak Menteri kunjungan secara spesifik ke Sumatera Utara, Palembang, Jambi dan lain sebagainya itu ada beberapa bangunan yang mangkrak dan itu bisa dilihat secara kasat mata Pak Menteri bahkan di UIN Sumatera Utara itu persis di depan Rektor Pak. Artinya Pak, rektornya setiap hari melihat Pak kenapa sampai sudah selesai 100% anggarannya tapi gedungnya tidak selesai. Nah ini mungkin evaluasi kita untuk ke depan supaya tidak terjadi seperti hal yang tidak kita diinginkan yang dananya dari SBSN.

Yang ketiga bagaimana rencana kerja Kementerian Agama di Indonesia Tahun 2022 program prioritasnya di bidang agama dan pendidikan meliputi apa saja dan target yang ingin dicapai misalkan OPQ kemarin Pak Menteri saya kira semua anggota Komisi VIII ini mendukung penuh 1000% Pak bila Unit percetakan Al-quran itu benar-benar berkelas dunia dan bisa menjawab tantangan yang menjadi selama ini sebuah hambatan yang begitu luar biasa terhadap kebutuhan mushaf Alquran di tanah air. Maka sekali lagi itu menjadi perhatian kita semua.

Kemudian program revitalisasi KUA ini juga kami dukung Pak Menteri intinya kami juga setuju dengan Pak Menteri keuangan bukan hanya tempat orang menikah Pak ya tapi juga fungsi-fungsi agama yang lain juga harus berjalan dengan baik pertama masalah moderasi beragama dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kami meyakini Pak Menteri sudah menyiapkan segala sesuatu terhadap pengantar rancangan anggaran tahun 2022 dengan baik sehingga wajah Kementerian Agama semakin semakin baik, baik fungsi pendidikan maupun fungsi agama. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Menteri atas kerjasamanya dan pada para Anggota para Pimpinan sekali lagi Pak Menteri di Komisi VIII ini enak Pak karena komisi dunia akhirat. Jadi orangnya ya apa namanya demi merah putih lah ya sehingga kita bisa secara baik membahas anggaran dari hati ke hati dan ini sekali lagi kepentingan untuk bangsa dan negara.

Oleh karena itu kami persilahkan kepada Menteri Agama untuk menyampaikan paparannya dan kami ulangi kembali kepada para Anggota hal-hal yang menyangkut RAPBN Tahun 2022 mohon nanti kita perdalam dengan para Eselon I Sekjen dan para Dirjen termasuk para Direktur di tanggal 8 Juni 2021 di Wisma DPR Kopo kepada Pak Menteri kami persilakan.

#### **MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat dan kami hormati Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggota Komisi VIII yang berbahagia.

Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN dan rencana kerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Tahun 2022 sebagaimana undangan rapat dari Pimpinan DPR RI yang tertanggal 24 Mei 2021.

Selanjutnya kami akan menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini yaitu pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan rencana kerja Kementerian Agama Tahun 2022 evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021.

Yang pertama RAPBN dan rencana kerja Kementerian Agama Tahun 2022 Pagu indikatif Tahun 2022 berdasarkan surat bersama Menteri

Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Nomor S36/MK022/2020 2021 dan B238/M.BPN/D8/PP0402/04 2021 tanggal 29 April 2021 hal pagu indikatif belanja K/L Tahun 2022 Kementerian Agama mendapat Pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp66.497.274.699.000,- besar Pagu indikatif Tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp464.112.123.000,- atau minus 0,69% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Agama di awal tahun 2021 sebesar Rp66.961.386.822.000,-

Pagu indikatif sebagaimana tersebut diatas berasal dari beberapa sumber pendanaan yaitu rupiah murni, rupiah murni pendamping pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari Kementerian Agama dana yang dihasilkan dari Badan Layanan Umum dana pinjaman atau hibah luar negeri dan dana Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN.

Rincian sumber dana dimaksud adalah sebagaimana tertuang pada tabel nomor 3 sumber dana yang pertama Rupiah murni Pagu indikatifnya Rp58.675.198.000.137,- Rupiah murni pendamping Rp18.440.000.000,- penerimaan negara bukan pajak Rp1.929.612.556.000 dari BLU Rp2.248.867.659.000,- pinjaman luar negeri Rp795.155.250.000,- surat berharga syariah negara Rp2.830.000.000.997,- sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp66.497.274.699,-

Pagu indikatif Kementerian Agama Tahun 2022 akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup di dalam dua fungsi yang menjadi tugas Kementerian Agama yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan besaran masing-masing anggaran fungsi sebagaimana tabel berikut fungsi agama nilainya Rp10.611.806.801.000,- atau kalau di persentase 15,96%.

Kemudian fungsi pendidikan nilainya Rp55.885.467.898.000,- atau setara dengan 84,04% berdasarkan besaran anggaran fungsi agama atau yang hanya 15,96% dari total Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2022 merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Agama yaitu pembangunan nasional di bidang agama.

Adapun anggaran fungsi pendidikan pada Pagu indikatif tahun 2022 Kementerian Agama sebesar 84,04% dari total Pagu indikatif Kementerian Agama yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang terkait dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan.

Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2002 berdasarkan program yang dikelola Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 5 ini berdasarkan program.

1. Yang pertama dukungan manajemen.
2. Yang kedua kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama.

3. Yang ketiga pendidikan tinggi
4. Yang keempat peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
5. Yang kelima Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib belajar 12 tahun.

Secara total Pagu indikatif nilainya Rp66.497.274.699.000,-

Selanjutnya berdasarkan unit besaran Pagu indikatif Tahun 2022 pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Agama sebagaimana tabel yang tercantum di tabel 6 ini dijelaskan di tabel ini mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen pendidikan Ditjen bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Badan Litbang dan Diklat serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Rencana kerja Kementerian Agama Tahun 2022 rencana kerja Kementerian Agama Tahun 2022 disusun sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah Tahun 2022 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rencana kerja pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya arah kebijakan Kementerian Agama menyesuaikan dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan Presiden sebagai prioritas nasional sebagaimana terkandung dalam RPJMN 2020-2024 prioritas nasional tersebut terutama dalam sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing prioritas nasional ketiga serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebagai prioritas nasional keempat.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu indikatif belanja KL Tahun Anggaran 2022 output prioritas pada 5 program Kementerian Agama telah ditetapkan rincian-rincian kerja Kementerian berdasarkan output sebagaimana kami lampirkan.

Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 anggaran tahun 2020 berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 11 September 2019 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran KL tahun anggaran 2020 hasil rapat pembahasan Panitia Kerja, belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN tahun 2020 Kementerian Agama mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp65.060.948.695.000,-

Seiring dengan dinamika yang terjadi pada tahun anggaran 2020 alokasi anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan sebesar 8,47% atau Rp5.509.633.267.000,- menjadi Rp70.570.581.962.000,- berikut perubahan alokasi anggaran tahun anggaran 2020 Kementerian Agama di tabel 6 disajikan pagu awal Rp65.060.948.695.000,- dan pagu akhir Rp70.570.581.962.000,- sehingga ada selisih sekitar Rp5.509.633.267.000,- setara dengan 8,7% perubahan jumlah anggaran terjadi berkenaan dengan penghematan anggaran berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 dan penambahan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020.



Perubahan yang terjadi baik karena penambahan jumlah anggaran antara lain bantuan operasional kepada pondok pesantren pembelajaran jarak jauh bantuan subsidi upah guru dan dosen maupun karena pergeseran antar program kegiatan atau keluaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan dan tetap dalam koordinasi dan pengawasan DPR RI dalam hal ini Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Realisasi anggaran tahun 2020 amanah anggaran sebesar Rp70.570.581.962.000,- sudah direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama sebesar Rp67.984.181.158.634,- atau 96,34% dari total anggaran capaian realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 10 kementerian/lembaga dengan APBN terbesar realisasi ini berada diatas dan realisasi rata-rata nasional sebesar 94, 65% ini terlihat di tabel Nomor 10 tentang grafik realisasi belanja kementerian/lembaga dengan 10 APBN terbesar tahun 2020.

Berdasarkan tabel tersebut jika melihat serapan dibandingkan 10 K/L dengan APBN terbesar Kementerian Agama sudah bisa melaksanakan program mandatory yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja maupun program penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 termasuk berkontribusi dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berikut tabel realisasi APBN Kementerian Agama tahun 2020 dari Pagu Rp70.570.581.962.000,- realisasinya Rp67.984.180.158.634,- sehingga ada saldo Rp22.586.400.803.366,- adapun realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi program jenis belanja dan sumber dana serta realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 dapat dilihat pada table-tabel sebagai berikut di tabel 12 terdapat realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan fungsi baik fungsi agama maupun fungsi pendidikan dan jika dijumlah maka di APBN itu Rp70.570.581.962.000,- dengan realisasi Rp67.984.181.158.634,- atau memiliki saldo sebesar Rp2.586.483.366,- tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada fungsi pendidikan sebesar 96,38% sedangkan fungsi agama realisasi 96,01%.

Meskipun memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dalam realisasi namun secara nominal anggaran yang tidak terealisasi pada fungsi pendidikan adalah Rp2.221.180.028.625,- pada tanggal 13 kita suguhkan realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit Eselon I secara terperinci mula Inspektorat Jenderal sampai Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sehingga total jumlah sebagaimana yang tadi disampaikan di APBN Rp70.570.581.962.000,- dan di realisasinya Rp67.984.181.158.634,- sehingga masih ada saldo Rp2.586.400.803.366.- atau 96,34% terealisasi.

Urutan pada tabel diatas berdasarkan besaran nilai presentasi realisasi anggaran yang diemban oleh masing-masing unit Eselon I berdasarkan program yang menjadi tanggung jawabnya yang tersebar pada satuan-satuan kerja baik pusat instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis realisasi tertinggi terdapat pada Unit Inspektorat Jenderal dengan persentase sebesar 99,05% sedangkan yang paling rendah dalam realisasi adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu sebesar 85,4% ini terjadi karena

pembatalan keberangkatan Jamaah Haji tahun 2020 akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19.

Selanjutnya dinamika anggaran yang terjadi pada tahun 2020 di Kementerian Agama sangat terkait dengan penganggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berikut tabel realisasi anggaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 yang dimaksud realisasi anggaran Covid-19 tahun 2020 berdasarkan unit Eselon I ada pada tabel 16 secara terperinci sudah disampaikan berdasarkan tabel tersebut Kementerian Agama memiliki anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp5.306.530.890.000,- total anggaran tersebut terserap sebesar 80,9% berdasarkan jenis belanja realisasi tertinggi pada anggaran KCP PEN Kementerian Agama yaitu pada belanja modal sebesar 97,9% belanja bantuan sosial terserap 97,9% dan belanja barang terserap 80,88%.

Anggaran PC PEN tersebut berasal dari penetapan satuan anggaran bagian anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp5.106.477.447.000,- program PEN pada Kementerian Agama ini meliputi:

1. Yang pertama bantuan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Yang kedua bantuan pembelajaran daring di pesantren dan bantuan pembelajaran daring di PTKN.
3. Yang ketiga bantuan kegiatan Bimtek mubalik bersertifikat.
4. Yang keempat bantuan ormas keagamaan.
5. Yang kelima bantuan pembelajaran jarak jauh.
6. Yang keenam bantuan operasional pesantren.
7. Yang ketujuh bantuan afirmasi dan fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan.
8. Serta yang kedelapan bantuan subsidi upah atau BSU.

Penanggung jawab program tersebut di atas terdiri dari unit Eselon I Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Buddha.

Selain merealisasikan anggaran PEN sebesar 80,77% Kementerian Agama juga melakukan realokasi anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp449.625.870.956,- anggaran realokasi direalisasikan oleh unit Eselon I masing-masing yang digunakan untuk kegiatan afirmasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dengan output layanan dukungan manajemen, layanan perkantoran, layanan sarana dan prasarana internal.

Berikutnya evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 postur anggaran tahun 2021 dalam rangka melaksanakan rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan rencana kerja tahunan tahun 2021 Kementerian

Agama menerima surat Menteri Keuangan Nomor S903/Mahkamah Konstitusi.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang penyampaian alokasi anggaran Kementerian atau lembaga Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 sebesar Rp66.961.386.822.000,-

Selanjutnya anggaran Kementerian Agama mengalami perubahan dan penyesuaian akibat adanya perubahan target anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum pada perguruan tinggi keagamaan negeri luncuran anggaran Surat Berharga Syariah Negara tahun 2020 penerimaan hibah langsung dalam negeri penambahan belanja gaji pegawai dan penambahan anggaran melalui BA BUN untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh serta pengurangan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing tahun 2021 sehingga secara total anggaran Kementerian Agama tahun 2021 per 31 Mei 2021 berubah menjadi Rp67.430.825.007.000,-

Tabel 17 disajikan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 berdasarkan sumber dana penyesuaian sumber dana RM semula Rp59.158.725.000.603,- mengalami penghematan sebesar Rp483.541.964.000,- dan penambahan Rp451.695.988.000 sehingga menjadi Rp59.126.879.627.000,- sumber dana RMP semula Rp18.436.000.000,- tidak ada perubahan. Sumber dana PNPB Rp1.740.898.541.000,- mengalami penghematan Rp14.500.000,- sehingga menjadi Rp71.740.884.041.000,-

Dari sumber dana BLU semula Rp2.021.508.753.000,- mendapatkan penambahan Rp205.028.561.000,- sehingga menjadi Rp2.226.537.000.314,- sumber dana PLN semula Rp660.366.917.000,- tidak mengalami perubahan sumber dana SBSN semula Rp3.361.451.008.000,- mendapatkan penambahan sebesar Rp294.827.486.000,- sehingga menjadi Rp3.656.278.000.494,-

Hibah dalam negeri mendapat semula tidak ada mendapatkan penambahan sebesar Rp1.442.614.000,- sehingga jika dijumlah semula Rp66.961.386.000.822,- mengalami penghematan dan penambahan sehingga menjadi Rp67.430.825.007.000,- dari jumlah anggaran tersebut diatas sumber pendanaan yang berasal dari Rupiah murni mendominasi keseluruhan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dengan nilai Rp59.126.879.627.000,- atau setara dengan 87,69%.

Untuk realisasi anggaran tahun 2021 pelaksanaan anggaran Kementerian Agama sampai tanggal 31 Mei 2021 realisasi anggaran sebesar 35,54% sebagaimana tabel berikut tersaji di tabel 18 realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 setelah penyesuaian dari pagu Rp67.430.000.000.000,- realisasinya Rp23.965.000.000.000,- sehingga ada sisa Pagu Rp43.465.148.451.729,- ini setara dengan 35,54%

Anggaran sebagaimana tersebut diatas direalisasikan untuk membiayai penyelenggaraan 5 program oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan 31 Mei 2021 realisasi pemanfaatan anggaran tersebut berdasarkan program setelah mengalami penyesuaian atau perubahan anggaran sebagai berikut.

Anggaran tahun 2021 berdasarkan program pada tabel 19 sumber dana dukungan manajemen Pagu Rp35.593.000.000.000,- realisasi sebesar Rp14.358.000.000.000,- sehingga masih ada sisa Rp21.234.904.067.000,- atau sekitar 40,34%.

Sumber dana untuk kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama dari pagu Rp2.984.000.000.000,- terealisasi Rp617,7 miliar kemudian Masih ada sisa Rp2.362.851.483.000,- atau 20,73% yang terserap. Kemudian sumber dana untuk pendidikan tinggi dari pagu Rp7,3 triliun terealisasi Rp1.384.000.000.000,- masih ada sisa Rp5.956.487.970.000,- atau terpakai 23,21%.

Kemudian kualitas pengajaran dan pembelajaran Pagu Rp7,094 triliun realisasi Rp1,64 triliun masih ada sisa Rp5.448.075.668.000,- pendidikan usia dini dan wajib belajar 12 tahun Pagu Rp14.420.000.000.000,- terealisasi Rp5.957.000.000.000,- dan masih ada sisa Rp8.462.829.269.000,- sehingga secara total dari pagu Rp67.430.825.007.000,- terealisasi Rp23.965.676.555.000,- dan masih tersisa Rp43.465.148.452.000,-

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan fungsi anggaran Kementerian terdiri dari dua fungsi yaitu anggaran fungsi agama dan fungsi pendidikan anggaran fungsi pendidikan Kementerian Agama masih mendominasi keseluruhan anggaran tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp57.431.229.529.000,- atau 85.17% dari total anggaran tahun 2021 sementara besaran anggaran fungsi agama Rp9.999.595.478.000,- atau hanya 14.83% dari total anggaran Kementerian Agama tahun 2021.

Berikut tabel realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi per 31 Mei 2021 bisa dibaca di tabel 20 tentang realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi sebagaimana sudah saya sampaikan selanjutnya penyelenggaraan program-program dilaksanakan oleh 11 unit organisasi Eselon I Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsinya besaran anggaran berdasarkan unit Eselon I dan realisasi masing-masing sebagaimana tabel berikut.

- Pertama unit Eselon I Sekretariat Jenderal dari pagu Rp2,225 Triliun terealisasi Rp857.648.063.000 dan masih ada sisa Pagu Rp1.368.284.725.000,- atau terserap 38 53%.
- Dari Inspektorat Jenderal pagu Rp159.7Miliar terealisasi Rp56,181 Miliar masih ada sisa pagu Rp103.583.773.000,- terserap 35,6%.
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Rp5,6 Triliun terealisasi Rp1.9Triliun dan masih ada sisa Pagu Rp3.692.737.785.000,-
- Ditjen Pendidikan Islam Rp53.348Triliun terealisasi Rp19.256Triliun dan masih ada sisa pagu Rp34.092.168.461.000,-
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen Rp1.847.000.000.000,- terealisasi Rp590.012.900.000,- masih ada sisa pagu Rp1.257.116.677.000,-

- Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik dari pagu Rp886.800.000.000.000,- teralisasi Rp301.147.000.000.000,- dan masih ada sisa pagu Rp585.652.551.000,-
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu pagu Rp781,5Miliar terealisasi Rp279.856.000.000.000,- dan masih ada sisa pagu Rp501.643.865.000,-
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha Rp260,65Miliar terealisasi Rp97.357.000.000.000,- dan ada sisa pagu Rp163.293.133.000,-
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pagu Rp1.541.000.000.000,- terealisasi Rp332.610.000.000.000,- dan masih ada sisa Pagu Rp1.209.172.832.000,-
- Badan Litbang dan Pendidikan Pelatihan dari Pagu Rp627.9Miliar terealisasi Rp207.8Miliar dan masih ada sisa Pagu Rp420.084.197.000,-
- Badan penyelenggara jaminan produk halal pagunya Rp84.2Miliar terealisasi Rp12.8Miliar dan masih ada sisa pagu Rp71.408.453.000,-

Serapan anggaran terbesar terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 38.53% sedangkan terendah terdapat pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan serapan hanya sebesar 15,2% berikutnya terkait dengan penghematan anggaran belanja pegawai Tahun 2021 anggaran Kementerian Agama kembali mengalami perubahan yang disebabkan adanya penghematan anggaran oleh pemerintah yang disampaikan melalui surat Menteri Keuangan tentang penghematan belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021.

Surat tersebut menetapkan Kementerian Agama untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp712.784.593.000,- yang diambil dari sumber dana Rupiah murni dan non rupiah murni yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 pada komponen tunjangan khusus atau tunjangan kinerja sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021.

Tidak seperti penghematan sebelumnya, penghematan kali ini menyertakan anggaran yang berada pada fungsi pendidikan Kementerian Agama melalui masing-masing unit Eselon I saat ini masih melakukan pembahasan revisi anggaran bersama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka penghematan yang dimaksud tertuang di dalam tabel 23. Yang terkait dengan besaran penghematan belanja pegawai berdasarkan unit Eselon I mulai dari Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen penyelenggaraan Haji dan Umroh, Badan Litbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal total Rp712.784 .593.000

Karena penghematan ini Bapak/Ibu sekalian dipastikan postur anggaran Kementerian Agama akan kembali mengalami perubahan

dikarenakan akan berkurang sebesar Rp712.784.593.000,- tadi yang diambil dari belanja operasional pegawai komponen tukin

Sebagai penutup, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat dalam rapat kerja pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian tahun anggaran 2022 evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tahun anggaran 2021. Kami berharap perhatian dan dukungan dari Pimpinan tentu saja dan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat dalam rangka peningkatan kualitas bimbingan dan pelayanan kepada umat beragama kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi ikhtiar kita semua dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan paparan terhadap 3 anggaran, anggaran rencana anggaran tahun 2022 dimana ada penurunan sekitar Rp464.000.000.000,- yang turun itu SBSN ya Pak Menteri ya kalau tahun 2021 Rp13.36Triliun sekarang hanya Rp2.830.000.000.000,-

Kemudian di tahun 2020 serapannya sangat baik ini sangat baik 96,34% tapi sangat baik masih triliunan juga Pak saldonya Pak Rp2,5Triliun yang tidak habis yang paling besar tentu fungsi pendidikan Rp2.2Triliun Pak Ditjen tidak mau duit atau bagaimana ini Pak fungsi Agama juga Rp365Miliar tinggi juga.

Nah dibandingkan dengan satu mitra Komisi VIII ini kan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ya itu hanya Rp300.000.000.000,- Pak Satu Menteri Pak ini saldonya saja Rp2,2 triliun Rp2,5 triliun jadi masih besar Pak Menteri. Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita semua artinya kalau bisa dinaikkan 96 ke 98 atau 97 itu tentu akan semakin baik Pak sarapannya.

Kemudian tahun 2021 Bapak Ibu Anggota Pimpinan tadi kita dengar serapannya sekarang sampai bulan Juni awal 35,54% atau 23,9 triliun yang belum terserap Rp43,5 triliun itu masih banyak bulan ini bulan Juni tapi biasa kalau kementerian di bulan Oktober November itu biasanya dikebut ya pembayaran-pembayaran sehingga ketika kita mengevaluasi termasuk juga akan menyetujui anggaran tahun 2022 itu benar-benar cermat dan tepat sasaran.

Sekali lagi terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran Pak Wamen dan para Eselon I sudah memaparkan sedemikian rupa terhadap agenda hari ini yaitu pengantar anggaran tahun 2022 evaluasi tahun 2021 dan serapan anggaran tahun 2020 kami persilahkan kepada para Anggota tapi sekali lagi kalau anggaran detailnya nanti tanggal 8 tanggal 7 8 9 Kementerian Agama tanggal 8 hari selasa kalau mau memperdalam harus hadir susah kalau dari virtual, kalau virtual itu siinyalnya tidak masuk lah ada juga Pimpinan main sama Kementerian Agama sudahlah yang itu tidak usah ngapain.

Jadi kalau benar-benar serius mohon kehadirannya nanti di Wisma Kopo ya tentu para Wakil Ketua sudah saya bagi untuk memimpin rapat berdasarkan Kementerian mitra kerja kita kami persilakan Mungkin ada yang perlu disampaikan sama Pak Kyai Maman Imanul Haq dari PKB kami persilakan Pak.

#### **F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.  
Pak Menteri Agama Pak Wamen dan seluruh jajaran.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kita akan mengeksplorasi seluruh anggaran ini menjadi politik anggaran yang bisa mensejahterakan masyarakat. Maka sesungguhnya belajar dari tadi pagi ya saya minta Pimpinan untuk tidak langsung membuat kalimat keputusan rapat ini menjadi menerima tapi cukup memahami karena ada hal yang menarik dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi apalagi ini adalah kementerian yang menjadi fokus kita di Komisi VIII.

Tadi kami bisik-bisik juga dengan ngobrol juga setelah BNPB seharusnya kalimatnya tidak langsung diterima tapi langsung dipahami dan nanti kita akan elaborasi sehingga kita bisa melihat sebenarnya di Dirjen mana yang betul-betul Kita akan konsentrasi lalu di beberapa penghargaan mana yang sebenarnya kita tidak terlalu fokus ke sana ini menjadi penting bagi kita dan usulan dari PKB seperti itu nanti di kita elaborasi di konsinyering dan keputusan rapat hanya menggaris bawah soal memahami anggaran ini. Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya betul tadi pagi juga saya sebenarnya mau koreksi juga itu tadi pas saya lempar ke Anggota setuju semua saya juga susah itu kalau sudah setuju semua seolah-olah nanti saya main sama BNPB. Kalau saya tidak setuju ya kan Kepala BNPB lebih setuju karena menerima bagaimana kita tidak setuju.

Mungkin tapi tadi pagi itu karena baru Pagu indikatif itulah kalau baru pagu indikatif kita tolak ngeri-neri sedap itu, silakan Pak Samsu Niang.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak Samsu Niang ini sebagai juru bicara Komisi VIII atau ada

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Terserah Pak Ketua kalau bilang juru bicara siap, tidak perlu lah masih banyak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan-silakan.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan Anggota dan Pak Menteri Pak Wamen dan beserta seluruh jajarannya.

Saya kira kita sudah mendengarkan tadi dan ada kesimpulan tadi dari awal yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk pembahasan yang lebih detail nanti pada saat konsinyering. Cuma saya minta kepada Pak Menteri bahwa nanti tanggal 8 itu tidak ada satupun Eselon I yang tidak hadir biasa itu biasa juga pada saat Konsinyering itu ada yang tidak hadir.

Oleh karena itu kita minta pada hari ini pada saat pembahasan karena kalau tidak hadir Pak tidak pasti di Komisi VIII tidak jadi membahas karena ini Marwah Komisi VIII itu berarti kita dilecehkan kita sudah sepakat.

**KETUA RAPAT:**

Ini ancaman atau ajakan Pak



**F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Ya maksudnya ini, ini membahas anggaran yang strategis dalam rangka untuk kepentingan umat. Berarti masih tahap ajakan ya.

**KETUA RAPAT:**

Berarti masih tahap ajakan ya.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Jadi olehnya itu saya pikir saya ingatkan Pak menteri bahwa pada saat tanggal 8 jatah Kementerian Agama tidak ada satupun Eselon I yang tidak ada insyallah hadir pasti hadir Pak.

Kemudian yang kedua saya sependapat dengan Pak Maman bahwa kesimpulan rapat ini memahami gitu belum karena kita belum bahas secara detail cuma yang perlu saya bertegas lagi ini dari 2020, 2021, 2022 kok menurun ini anggaranya Kementerian Agama ini berarti negosiasi dengan Kementerian Agama ini belum kuat-kuat ini Pak ya? Kalau masih bisa masih bisa masak dari 67 turun 66 padahal fungsi agama ini yang paling penting bagi kita.

Jadi ini yang kemudian yang kedua mungkin ada sedikit kesalahan disini kenapa SBSN dikurangi gitu sementara kebutuhan kita untuk perguruan tinggi terus KUA, terus apa asrama haji itu sangat dibutuhkan untuk itu jadi perlu barangkali padahal kedepan ini mungkin saja tidak naik haji lagi anggaran untuk yang dipersiapkan kemarin itu masih bisa memanfaatkan SBSN untuk itu jadi perlu ada lobi-lobi dalam rangka untuk ke depan ini terutama SP kalau mengandalkan rupiah murni Pak sangat kecil anggaran kita ini.

Jadi itu yang barangkali yang saya ingin sampaikan kemudian yang terakhir ya saya kira teman-teman Komisi VIII ini ya disumpah untuk memperjuangkan Dapil, memperjuangkan daerah pemilihannya. Jadi ini penting Pak, Pak Menteri juga pada saat jadi Anggota DPRD disumpah memperjuangkan daerah pemilihannya. Jadi kalau pernah disumpah Pak memperjuangkan daerah pemilihannya bagaimana caranya itu Pak kita memperjuangkan Dapil Pak ini. Jadi ini hanya kita mau alangkah enaknya Pak. Kalau Pak Menteri misalnya ke Sulsel Panggil Pak Samsu Niang, Pak Samsu Niang datang kesini dampingi saya bangga kita Pak ini naik satu level satu jengkal itu leher kita ini karena mendampingi Bapak disitulah letak sinergitas antara eksekutif dengan legislatif ini kadang-kadang dilupakan Pak. Pak menteri datang kesana, Pak dirjen datang kesana tdiak dipanggil-panggil Komisi VIII yang ada di daerah itu ini yang penting dalam rangka kedepannya ini. Terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT :**

Baik dan ini saya sampaikan kepada Anggota ya yang terakhir tadi cukup Pak Samsu Niang yang ngomong tidak usah diulang lagi pak menteri sudah paham nanti kalau diulang malah tidak jadi ini. Yang lain silakan Pak Achmad Bu Wulan setelah itu ya.

## **F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Terima kasih.

*Bismilahirrahmannirahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan serta seluruh Anggota baik yang fisik maupun virtual.

Pak Menteri Pak Wamen

Poak Sekjen dan seluruh Tim anggaran dari Pak Menteri.

Pertama saya menyorot struktur anggaran Pak Menteri struktur anggaran saya tidak membahas tapi struktur anggaran kita ini itu belanja pegawainya 47,6% belanja, non operasionalnya 48. Jadi hampir fifty-fifty. Sebab ini struktur anggaran suatu lembaga itu maksimal untuk belanja pegawai itu 30%, 70% untuk masyarakat itu. Jadi ini nanti mungkin di dalam pembahasan mungkin bisa didalami alangkah baiknya lebih banyak ke masyarakat itu atau lembaga pendidikan itu sehingga struktur kita itu nampak kita berpihak kepada rakyat nampak keadilan disana itu.

Nah kemudian dari segi pengalaman ini kan mulai 2020 awal 2021, 2022 kita kan dikepung oleh Covid ini. Tetapi saya perhatikan dalam ekspektasi kita membuat anggaran ini seperti Covid itu tidak ada gitu artinya kita membuat anggaran ini dalam kondisi normal padahal kita tidak normal kondisi sekarang ini lah kenapa tidak kita sesuaikan *mindset* kita dengan kondisi tidak normal itu menyusun anggaran ini di perencanaan begitu.

Nah akibatnya kita tidak mempedulikan Covid ini sehingga terjadi Silpa itu 2020 itu kan Rp2,5 Triliun kalau memang boleh kita maklumi karena itu awal dari Covid April mulainya tapi maunya 2021 jangan ada silpa lagi nanti kalau Rp2,5 Triliun itu Pak dibagikan kepada mahasiswa kita yang belajar ini, ini menyentuh langsung dan terasa suasana Covid ini.

Nah kami menyarankan ya untuk anggaran 2022 ini yang belum lagi dilaksanakan tapi dalam perencanaan bagaimana ini anggaran ini jangan sampai silpa tetapi anggaran langsung menyentuh kepada masyarakat kita ke pendidikan kita. Sehingga kita tidak lagi disibukkan dengan mungkin terlalu dengan kondisi Covid ini *tender menender* seperti perguruan tinggi, perguruan tinggi pasti *tender menender* tapi bagaimana kalau di kita perbanyak ini model PL-PL saja yang langsung menyentuh kepada madrasah kita sekolah kita begitu pondok pesantren kita dengan dana Rp27 Triliun dulu ini manfaatnya bagi pondok-pondok pesantren, madrasah rumah tahfidz, luar biasa Pak terangkat. Kami Komisi VIII secara nasional Pak membantu mereka itu memberikan dana non operasional yang tidak untuk fisik.

Nah bagaimana kita berkaca itu bagaimana 2022 itu kita lakukan hal yang sama ini contohnya lagi perguruan tinggi ini, inikan dananya Rp7.000.000.000.000,- sampai hari ini baru Rp1.000.000.000.000,- Pak Perguruan Tinggi Islam ini kenapa ini juga kita terus kenapa tidak ke cururkan kepada sekolah MTS, MA, MI yaitu yang langsung menyentuh karena belum tentu anak-anak didik kita yang tamat dari MA/MTS itu akan ke perguruan tinggi belum tentu Pak. Mungkin paling-paling 5% kenapa yang 80% ini tidak kita gelembungkan dananya isi ada unsur keadilan disitu.

Jadi saya menengok Kementerian Agama selama 3 tahun dalam Covid ini mindset berpikinya secara normal harusnya tidak normal. Kenapa? Karena kita dalam suatu Covid itu harus seperti itu sehingga kalau tidak seperti itu mindset cara berpikir kita ini akan terus silpa terus ini jangan-jangan 2021 bisa Rp5.000.000.000.000,-.

Lha kalau Rp5.000.000.000.000,- kalau kita hibahkan ke pendidikan agama luar biasa Pak hibah ini yang paling gampang bisa di mereka mandiri. Bisa mereka mengerjakan manfaatnya dapat kita tidak punya utang kepada rakyatnya dengan silpa.

Jadi saran kami Pak Ketua bagaimana diperbanyak hibah ini untuk 2022 ini sehingga tidak dipusingkan dengan pertanggung jawaban oleh kementerian ini begitu. Ini saran kami terima kasih kami tidak bahas secara detail tapi itu *over all*.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Lanjut Bu Wulan, Bu Lisda hebat juga. Bu Wulan ini tidak berani sama kapoksi ini silakan Bu Lisda.

#### **F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismilahirahmannirahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.  
Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Dari dalam paparan yang disampaikan Pak Menteri tadi Pagu Anggaran terbesar adalah pada fungsi agama dan juga fungsi pendidikan yaitu sekitar 85%. Oleh sebab itu kami meminta kepada Pak Menteri untuk terus memperbaiki rencana program dan alokasi anggaran pada fungsi agama dan pendidikan karena sampai saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19 ya contohnya saja seperti bantuan pada penanggulangan Covid-19 kepada ustadz dan juga tenaga-tenaga pengajar atau tenaga pendidik

keagamaan. Kemudian madrasah pondok pesantren dan tempat ibadah yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Untuk selanjutnya adalah evaluasi kinerja kementerian yang merupakan langkah sistem dan terukur karena memang selama tahun 2020 ini memang ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini untuk itu saya berharap bahwa di tahun ke depan sosialisasi dan dapat dimanfaatkan memanfaatkan penyuluh penyuluh dan juga Ustadz atau guru-guru yang ada di lingkungan Kemenag sehingga mereka pun bisa mendapat perhatian.

Dan selanjutnya Pak Menteri kami mendengar tentang PIP. Tapi terus terang kami dari Komisi VIII ini tidak pernah tahu dengan PIP itu mungkin nanti ada penjelasan seperti apa untuk selanjutnya saya menyampaikan harapan dari Dapil Pak. Pertama adalah kami di Sumatera Barat sedang ada pembangunan asrama haji di Padang Pariaman dengan harapan pada tahun 2023 sudah dapat dimanfaatkan untuk membawa apa jamaah dari 2 provinsi yaitu Sumatera Barat dan juga Bengkulu.

Kemudian revitalisasi KUA di Sumatera Barat juga baru dapat 2 Pak sehingga kami berharap masih ada penambahan untuk Sumatera Barat. Kemudian juga harapan dari ada beberapa pejabat yang mereka berpindah-pindah daerah tapi pada saat pindah itu tidak disediakan rumah dinas bahkan tidak ada penggantian sewa sehingga mereka berharap ada anggaran untuk menyewa rumah. Selanjutnya adalah penambahan SDM Di Kanwil dan Kemenag di Sumatera Barat demikian terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Lisda kepada yang belum bicara kami ingatkan kembali kalau yang bahas anggaran khusus nanti kita konsinyering ya karena kita agenda hari ini mendengarkan pengantar dari Pak Menteri nanti kita akan ada rapat tertutup sangat penting juga rapat tertutup terkait masalah Haji. Baik Pak Jeffry Romdhony dari Gerindra.

#### **F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bismilahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Pertama ini mungkin terkait dengan penyampaian materi kepada kami sebelum rapat saya berharap mungkin waktunya jangan terlalu mepet ya kalau misalnya contoh di hari ini mungkin setidaknya Jumat itu sudah kita terima itu yang pertama.

Kemudian yang kedua maaf ni mungkin slide yang tadi ditayangkan di realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit Eselon I bisa ditampilkan dulu berangkai realisasi anggaran tahun 2020 tabel 13 ini berdasarkan Unit Eselon I koreksi sedikit Jadi intinya seperti ini saya lihat bukan yang itu yang totalnya 70 yang totalnya 70 bukan yang itu ya. 2021 yang 70 2021.

**KETUA RAPAT :**

2021 yang 70 2021

**F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

Disini saya lihat 2020 ya yang biaya realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit Eselon I bukan yang itu yang itu yang itu betul bukan tabel 13 kalau di sini mah ya itu betul saya ingin mengkoreksi saja.

**KETUA RAPAT :**

Sama saja tidak ada perubahan ini juga yang ditampilkan tadi itu.

**F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

Saya cuma ingin mengkoreksi saja. Ini angkanya tidak sama dengan di bahan yang kami terima di sini kayaknya kalau saya perhatikan. Mungkin itu kayaknya ada angka-angka yang terbalik-balik yang paling mencolok mungkin yang nomor 11 itu contohnya yang PHU ya 70 sekian sementara jumlahnya itu lebih kecil dan juga lain-lain. Sekretariat Jenderal sama Bimas Islam ya. Saya kira tertukar kemudian Pendis dengan Bimas Khatolik juga tertukar seperti itu barangkali sekedar koreksi saja Pak Menteri dan rasanya kalau disampaikan disini ya sudah harus akurat angkanya. Barangkali ya jangan misalnya tertukar seperti yang sudah ditayangkan tadi.

Kemudian juga ini terkait dengan hasil rapat sebelumnya mengenai upaya revitalisasi pencetakan Al-quran dan koordinasi wakaf Quran nasional dengan target 1.000.000 eksemplar saya lihat ini di alokasi belanja di Dirjen Bimas Islam ini belum tercantum secara spesifik barangkali mungkin ada penjelasan dari Pak Menteri. Demikian mungkin dari saya terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Lanjut Pak Kyai Bukhori dari PKS.

## **F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Pak Menteri dan seluruh jajaran saya hormati.

Bapak Ibu sekalian.

Pertama saya tidak ingin membahas secara detail terkait dengan dua hal. Pertama terkait dengan pagu anggaran tahun 2022 dan juga pelaksanaan anggaran tahun 2020 tahun 2021 karena itu saya setuju apa yang disampaikan teman-teman terdahulu bahwa ini belum bisa dapat kita setuju tetapi harus dibahas terlebih dahulu secara lebih detail dan rinci apalagi tadi sudah disiapkan waktunya. Jadi saya sepakat bahwa ini memang harus dibahas terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan. Kenapa? Karena persetujuan itulah merupakan salah satu basis untuk kita bisa menerima atau memahami terhadap rincian postur anggaran tahun 2022. Jadi saya kira ada kaitanya Pak Ketua.

Yang Kedua Bapak Ibu sekalian Pak Menteri saya ingin menegaskan dua hal pertama adalah tentang fungsi pendidikan di Kementerian Agama memiliki fungsi pendidikan kalau kita bicara pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 3 itu jelas pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional satu sistem pendidikan nasional itu di dalamnya salah satu pendidikan yang dikelola melalui Kementerian Agama. Saya tidak melihat adanya sebuah satu korelasi bahwa satu sistem pendidikan ini kemudian mendapatkan perlakuan secara adil secara anggaran. Karena itu saya mendorong kepada Menteri Agama khususnya Dirjen Pendidikan supaya melakukan lobi bukannya sekedar lobi kita boleh debat secara terbuka bagaimana memahami sebuah satu sistem pendidikan nasional yang mendapatkan anggaran secara berkeadilan.

Saya melihat pendidikan agama mulai dari tingkat Paud, TK, MI, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah khususnya dan juga perguruan tinggi khususnya swasta hampir semua itu swasta nyaris tidak mendapatkan perhatian sentuhan pemerintah sekali. Dan ini kemudian bisa diterjemahkan secara salah kaprah di pemerintah daerah bahwa karena Kementerian Agama ini merupakan kementerian vertikal maka dia tidak mengganggu. Saya kira ini perlu dibicarakan kembali Pak Menteri. Saya kira ini peluang Pak Menteri Agama untuk *bargaining* dalam konteks anggaran supaya anggaran yang 20% yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi data menyatakan bahwa pendidikan agama maupun pendidikan umum lebih dari 70 sampai 93% swasta khususnya di Kementerian Agama kurang lebih 93% itu swasta.

Kalau kemudian 93% itu swasta berarti mayoritas masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan. Itu tidak tersentuh karena itu dalam konteks ini saya mohon saya mengharap justru ini

seharusnya dari Kementerian Agama memunculkan. Tetapi saya menyampaikan ini berkali-kali di berbagai forum termasuk kemudian juga di kementerian-kementerian di tingkat wilayah maksud saya juga di Kanwil bahkan kemudian di tingkat kemenag ini saya sampaikan harusnya bidang pendidikan ini kemudian segera melakukan sebuah satu reformasi meminta keadilan anggaran pendidikan. Jangan sampai kemudian pendidikan itu hanya diplotkan atau diberikan kepada kelompok tertentu saja. Seluruh masyarakat punya hak ini dalam konteks ini adalah Kementerian Agama adalah pendidikan agama karena jumlahnya cukup besar.

Dengan demikian saya yakin peluang kita untuk mendapatkan pagu anggaran khususnya pendidikan menjadi sangat besar peluangnya. Ini yang pertama Pak Menteri yang kedua fungsi keagamaan saya sangat setuju bahwa fungsi keagamaan ini kemudian salah satu cerminnya adalah yang menjadi etalase di dalam Kementerian Agama itu adalah Kantor Urusan Agama.

Jadi kalau sudah bicara Kementerian Agama masyarakat kecil tahunya KUA Pak. Oleh karena itu saya kira sudah tepat kalau Pak Menteri kemarin itu juga menggagas adanya revitalisasi. Kami berharap bahwa KUA ini tidak hanya kemudian direvitalisasi secara fisik dan kami sangat mendukung bahwa upaya revitalisasi itu dimulai dari fisik tetapi kemudian non fisik yaitu sumber daya manusianya harus kemudian diperkuat khususnya bahwa KUA itu harus mampu menjadi ikon untuk menjadi tempat bertemunya berbagai macam kelompok masyarakat. Jangan sampai kemudian cara-cara kita menyelesaikan problem kemasyarakatan yang karena salah paham itu dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Contoh, melakukan tes kebangsaan. Saya kira ini berbahaya sekali itu akan bisa mensplit terhadap masyarakat bahwa konteks-konteks perbedaan itu mesti ada karena itu tempatnya penyelesaiannya dimana? KUA. Supaya KUA itu bisa menyelesaikan diberdayakan di tingkat dan sumber dayanya. Insya Allah bahwa dengan negara sebagai dasar negara adalah agama itu kemudian agama mampu menjembatani mampu menjadi instrumen yang bisa membuat situasi kondusif.

Dan yang terakhir Pak Menteri termasuk fungsi keagamaan. Menurut saya berbagai macam kantor-kantor Kementerian Agama khususnya yang ada di berbagai macam wilayah. Kanwil-kanwil saya kira juga perlu adanya revitalisasi supaya ada *sub'ah* ada tampak yang kemudian oh memang ini negara bukan negara sekuler negara agama. Jangan kemudian bank-banknya di sekitarnya kantor-kantornya megah, Kantor Kementerian Agama atau kantor kanwil ini rasanya menyedihkan sekali untuk parkir saja susah. Ini saya kira juga perlu pertimbangan perlu hal-hal supaya bahwa konteks keagamaan di negeri ini sebagaimana titipan para *the founding fathers* kita itu betul-betul kita jalankan.

Termasuk kemudian bisa merubah terhadap persoalan masalah asrama-asrama haji. Saya kira teman-teman Komisi VIII tahun 2020 itu kemudian menegaskan bahwa kita perlu membuat sebuah satu terobosan baru asrama haji. Jangan kemudian dijadikan sebagai asrama yang membebani kepada APBN terus-menerus tapi bagaimana supaya asrama haji itu ke depan bisa menjadi satu tempat yang produktif tempat yang

menghasilkan dan kemudian bisa mandiri. Karena itu kemudian kita perlu revitalisasi dalam konteks pemondokan agama apakah kemudian namanya tetap adalah asrama haji atau ..... misalnya dan seterusnya itu adalah persoalan lain tapi kemudian gagasan besarnya adalah bagaimana supaya tempat-tempat asrama haji ini tidak menjadi beban dari APBN. Kalau kita lihat selama apa namanya selama Covid ini hampir semuanya kemudian semuanya tidak bisa menghasilkan. Nah karena itu kemudian kita perlu adanya pemikiran baru Pak Menteri.

Saya kira itu tiga hal yang kemudian kami sampaikan dan sekaligus bagaimanapun juga semua program-program yang sifatnya untuk kemaslahatan bangsa dan umat tentu PKS sangat mendukung dan yang pertama kali akan siap untuk mendukungnya demikian.

*Wallahul Muwafik illa Aqwamith Tharieq  
Wa Billahi tautiq wal hidayah.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Itu untungya secara fisik kalau secara virtual sudah saya putus persidangannya Pak. Baik ini sudah jam 4 Bapak Ibu Anggota dari meja Pimpinan ada cukup ya? Baik Pak Menteri, silakan ada yang perlu direspon tapi masalah anggaran nanti kita kan perdalam di konsinyering Pak tanggal 8 Juni silakan Pak.

#### **MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Baik terima kasih Pimpinan. Jadi lebih banyak masukan saya kira daripada pertanyaan dan selebihnya tentu saya setuju dan di depan Bapak Ibu sekalian yang memerintahkan seluruh Eselon I untuk hadir semua ini mana Pak, mana Pak Samsu? Tidak ada ini. Kalau tidak hadir di konsinyering saya akan kasih *punishment* nanti Pak jangan khawatir.

Di soal yang lain-lain tadi soal masuk anggaran sebagaimana perintah Pimpinan supaya di konsinyering diselesaikan. Tapi Pak Jefry saya kira salah membaca tabel tadi Pak itu rupiah Pak bukan triliun ya. Jadi mungkin karena Pak Jefry melihat-melihat tabel yang lain triliun tapi ini dalam rupiah kalau dalam rupiah pasti akan lain itu tadi saya memaknainya mungkin Pak Jefri ini melihatnya di dalam triliun kalau di dalam triliun pasti akan terlihat besar ini. Tapi dikurung di atas pojok itu rupiah Pak bukan triliun. Jadi saya kira tidak ada yang kebalik disini ya yang nanti coba dibaca lagi kita lihat bener tidak terbalik atau tidak begitu. Tapi kalau di yang saya pegang tidak ada yang kebalik yang khusus Covid ini.

Saya kira dan yang penting yang perlu saya beri respon dari Pak Bukhory jadi memang revitalisasi KUA ini bukan hanya fisik Pak. Jadi kalau kemarin kami me-*launching* di Banjarnegara dan beberapa tempat 65 tempat



yang lain ada 6 tempat itu memang tidak fisik. Fisik itu hanya salah satu, salah satu dari yang kami revitalisasi termasuk di dalamnya kita juga revitalisasi, revitalisasi itu hardware dan software, software-nya juga kita akan revitalisasi software itu termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia di dalamnya akan kita berikan tambahan kapasitas-kapasitas ketika memberikan layanan kepada masyarakat mereka mampu tidak hanya menjalankan fungsi KUA kantor urusan agama yang kemarin saya sampaikan itu Pak. Jadi KUA ini benar-benar kantor urusan agama karena urusan agama itu banyak sekali termasuk bagaimana mengelola perbedaan.

Jadi saya setuju bahwa Indonesia ini memang apa namanya harus ada konteks-konteks perbedaan. Saya setuju harus ada konteks perbedaan tetapi dalam memandang kebangsaan tidak boleh ada perbedaan harus sama merah putih Indonesia Raya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika tidak ada lagi alternatif di luar itu NKRI harga mati Pak.

Jadi kalau pandangan-pandangan perbedaan-perbedaan suku perbedaan agama perbedaan ras *monggo* ini Indonesia. Tapi ketika melihat kebangsaan saya kira tidak boleh ada tawar-menawar disitu bahwa Indonesia ini ya Pancasila Undang-undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya sebagaimana konsensus yang dulu disepakati oleh para *founding fathers* dengan begitu tidak ada lagi yang menyalahi apa kesepakatan-kesepakatan bangsa kebangsaan kita sehingga negara kita tetap utuh dengan perbedaan-perbedaan yang ada.

Saya kira demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan terima kasih. Secara detail nanti saya akan mewajibkan seluruh Eselon I menghadiri konsinyering dengan membahas anggaran secara tuntas.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT :**

*Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Baik, terima kasih Pak Menteri. Tapi konsekuensi juga nih para Anggota kalau minta mitra kita lengkap ya sebaiknya semua fraksi lengkap begitu ya supaya nanti tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang miskomunikasi. Baik kita memasuki agenda yang keempat yaitu kesimpulan saya akan membacakan draf kesimpulan pada rapat kerja hari ini. Sekali lagi kita setelah ini kita tetap ditempat dan bagi para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam rapat finalisasi haji kami mohon nanti meninggalkan ruangan ini karena kita akan melanjutkan rapat tertutup.

Baik Bapak Ibu Pak Menteri saya akan bacakan draf nanti baik dari para Anggota meja Pimpinan maupun dari Pak Menteri dan jajaran untuk merevisi baik dari draf maupun makna setelah saya bacakan draf kesimpulan.

Draft Kesimpulan  
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia  
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020/2021  
Rabu 2 Juni 2001

Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2021 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Komisi VIII DPR RI memahami dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp66.497.497.274.699.000,- mengalami penurunan sebesar Rp464.112.123.000,- atau sebesar 0,69% penurunan bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Agama di awal tahun 2001 Rp66.961.386.822.000,-
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 sebesar Rp67.994.181.154.634,- atau 96,34% menempati peringkat ketiga tertinggi dari 10 Kementerian lembaga dengan APBN terbesar dan berada di atas realisasi rata-rata nasional sebesar 94,65%.
3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai serapan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp23.965.676.555.271,- sebesar 35,54% dari total pagu anggaran Rp67.430.825.007.000,-
4. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja fungsi agama dan fungsi pendidikan.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan meneliti pandangan Pimpinan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut.
  - a. pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya dalam pengalokasian anggaran penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia
  - b. agar pengelolaan dan pelaksanaan program Indonesia Pintar dapat disampaikan ke Komisi VIII DPR RI guna evaluasi dan peningkatan program ke depan
  - c. mendorong agar pengelolaan asrama haji di lingkungan Kementerian Agama Republik agar bisa mandiri dan professional.

Saya kira itu silakan dari meja Pimpinan maupun dari para Anggota sebelum ke Pak Menteri ada perbaikan redaksi atau pengurangan tambahan kami persilakan? Ada.

**F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):**

Ada satu Pak menurut saya kita perlu mendorong kepada Menteri Agama untuk meminta keadilan anggaran dalam bidang pendidikan. Saya kira perlu dimasukkan.

**KETUA RAPAT :**

Sudah kesimpulan rapat kemarin Pak, tadi memang sudah dicantumkan oleh Sekretariat tapi saya coret karena sudah ada kesimpulan rapat kemarin sama Pak Menteri hari Senin kemarin. Ada? Cukup? Pak Menteri silakan Pak Menteri.

**MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Izin Pimpinan di point 4 huruf a di pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam pengalokasian anggaran penanganan. Mungkin penanganan ini saya usulkan itu diganti di masa pandemi Pak karena ini bisa keliru pemaknaannya nanti program kita untuk penanganan covid menyaingi gugus tugas nanti Pak.

**KETUA RAPAT :**

Kementerian Agama jadi BNPB lama-lama Pak ya betul juga oke sudah diperbaiki ya? Yang lain Pak Menteri cukup ya baik.

Bapak Ibu Pak Menteri Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran.  
Para Anggota para Pimpinan Komisi VIII  
Hadirin yang berbahagia.

Dari draf kesimpulan yang saya sudah bacakan dan sudah mengalami perbaikan tidak perlu lagi saya bacakan secara keseluruhan. Oleh karena itu saya minta persetujuan forum rapat kerja ini apakah draf kesimpulan yang saya bacakan mengalami perbaikan bisa kita setuju sebagai sebuah kesimpulan rapat kerja pada hari ini setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik sebelum ditutup Pak Menteri kami persilakan untuk mengakhiri atau menyampaikan kata akhir dalam Rapat Kerja tentang Pengantar RAPBN Tahun 2022. Kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):**

Terima kasih Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi VIII yang terhormat

Saya kira saya harus menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rapat ini berjalan secara efektif dan sebagaimana tadi Pak Samsu sampaikan Insya Allah kami akan memberikan garansi semua

Komisi semua Eselon I akan hadir di konsinyering bersama Komisi VIII DPR RI Pak.

Jadi kalau tidak nanti *punishment* jelas jangan khawatir Pak dan yang lain-lain terkait apa soal dapil dan saya kira kita semua sudah paham Insya Allah kita akan selesaikan secara adat Pak terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Ya karena Pak Menteri ini punya Dapil sekarang yang kelola dapil Pak Nurhuda ini. Baik terima kasih Pak Menteri Pak Wakil Menteri serta seluruh Eselon I atau jajaran Kementerian Agama para Anggota para Pimpinan kita sudah sampai penghujung terima kasih sudah mengikuti rapat kerja dengan baik dan kita menyetujui sebuah kesimpulan, meneliti sebuah kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulan menjadi pedoman kita untuk membahas lebih mendalam dalam konsinyering.

Saya ulangi lagi tanggal 8 Juni 2001 di Wisma Kopo Wisma DPR Bapak Ibu nanti pihak Sekretariat Kemenag dan Komisi VIII bisa koordinasi lebih lanjut terutama bahan Pak Sekjen. Bahan yang akan diperdalam per Eselon I itu mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada para Anggota supaya nanti tidak ada lagi miss atau angkanya tertukar atau salah baca angka ini ngeri kalau salah baca angka Pak. Rp7.000.000.000,- dibuat Rp7.000.000.000.000,- itu bangkrut kita Pak nanti. Oleh karena itu perlu untuk menyampaikan bahan terlebih dahulu biar kita nanti rapatnya sudah membangun kesepahaman.

Sekali lagi terima kasih Pak Menteri Mohon maaf bila ada kekurangan dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* rapat kerja ini saya nyatakan ditutup terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Para Sekretariat coba ditertibkan dulu yang tapi kalau yang tidak bisa diwakilkan bisa Pak sekarang Pak maksud saya ke kamar mandi dulu atau ke mana boleh ya sambil pihak sekretariat untuk minta para wartawan dan para pihak yang mungkin tidak berkaitan langsung tidak langsung kami mohon untuk sejenak meninggalkan ruang Komisi VIII bukan ngusir tapi mohon meninggalkan ruangan Komisi VIII.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.06 WIB.**

**Jakarta, 2 Juni 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**